

ANALISA SITUASI DAN PERAN INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN SELAMA PANDEMI COVID-19

ANALYSIS OF THE SITUATION AND THE RURAL COMMUNITY INSTITUTIONS ROLE DURING THE PANDEMIC OF COVID-19

Saeroji¹, Isak Jurun Hans Tukayo², Syaifoel Hardy³
¹Balai Penyuluhan KB Kecamatan Munjungan, Trenggalek.
²Poltekkes Kemenkes Jayapura, Papua.
³Indonesian Nursing Trainers, Malang.
 Email: saderun@gmail.com

Abstrak

Latar belakang: Pandemi Covid-19 berdampak pada semua segi kehidupan global termasuk seluruh program Keluarga Berencana (KB) nasional yang mencakup Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana (KB) dan Kependudukan. Implementasi ketiga program tersebut melibatkan kader atau yang dikenal sebagai Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP). **Tujuan:** Mengkaji situasi peran IMP dalam program-program KB selama masa Covid-19 dan mengidentifikasi kemungkinan solusinya. **Metode:** Penelitian ini menggunakan kombinasi antara tinjauan pustaka dan survei analitik. Data primer diambil dari 57 responden yang berpartisipasi dalam survey berupa kuesioner, dilakukan secara Online pada 1-3 Mei 2021. Data sekunder berasal dari hasil tinjauan kepustakaan dengan menekankan konten pada peran IMP, manfaat dan strategi pembinaan. Sumber-sumber kepustakaan antara lain berasal dari WHO, Peraturan Pemerintah, BKKBN, Kementerian Kesehatan, BPS, serta berbagai jurnal terkait dari dalam dan luar negeri. Olah data dilakukan dengan menggunakan kombinasi Skala Nominal dan Skala Guttman. **Hasil:** Hasil penelitian dengan Skala Nominal menunjukkan 57 responden (100%) merasa Pandemi Covid-19 berdampak besar terhadap peran IMP. Dalam Skala Guttman menunjukkan dalam peran penyuluhan sebesar 200%, disusul peran pendataan dan pencatatan (142.34%) dan peran pelayanan KB (105.26%). **Diskusi:** Solusi yang disarankan adalah dengan berupa peningkatan kegiatan kolaborasi antara kader, PKB, pamong desa, pemerintah daerah serta pemerintah pusat sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan program KB.

Kata Kunci: Covid-19, IMP, Keluarga Berencana, PKB

Abstract

Background: The Covid-19 pandemic has an impact on all aspects of global life including all national Family Planning (KB) programs which include Family Development, Family Planning (KB) and Population. The implementation of these three programs involves cadres or what is known as the Rural Community Institution (IMP). **Objective:** To examine the situation of IMP's role in family planning programs during the Covid-19 period and identify possible solutions. **Methods:** This study uses a combination of literature review and analytic survey. Primary data was taken from 57 respondents who participated in a survey in the form of a questionnaire, conducted online on 1-3 May 2021. Secondary data came from the results of a literature review by emphasizing the content on the role of IMP, benefits and coaching strategies. Literature sources include WHO, Government Regulations, BKKBN, Ministry of Health, BPS, as well as various related journals from within and outside the country. Data processing was performed using a combination of the Nominal Scale and the Guttman Scale.

JURNAL

SKOLASTIK

KEPERAWATAN

VOL. 7, NO. 1
 Januari – Juni 2021

ISSN: 2443 – 0935
 E-ISSN 2443 - 16990

Results: The results of the study with a nominal scale showed 57 respondents (100%) felt that the Covid-19 pandemic had a major impact on the role of the IMP. In the Guttman scale, it shows that the role of outreach is 200%, followed by the role of data collection and recording (142.34%) and the role of family planning services (105.26%). **Discussion:** The solution suggested is to increase collaborative activities between cadres, PKB, village officials, local governments and the central government in implementing family planning programs.

Key Words: CLA, Covid-19, Family Planning, IMP

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung selama setahun lebih dari Maret 2020, berdampak pada semua segi kehidupan, termasuk pada program Keluarga Berencana (KB) nasional di mana angka kelahiran melonjak, penurunan jumlah akseptor serta tidak berjalannya sejumlah program KB lainnya yang membutuhkan tatap muka. Di level lapangan tingkat desa, dampak tersebut terasa karena melibatkan hubungan erat antara Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dengan Kader atau IMP. IMP ini memiliki andil yang sangat besar dalam meraih keberhasilan program-program KB di masyarakat (Sonata, 2016). Program ini erat kaitannya dengan upaya pengendalian jumlah penduduk melalui pembatasan jumlah kelahiran dengan metode penggunaan alat kontrasepsi (BKKN, 2016). Keberhasilan Indonesia dalam implementasi KB ini telah dikenal di dunia khususnya di antara negara-negara sedang dan berkembang (Widodo, 2019). Keberhasilan ini tidak lepas dari keikutsertaan IMP di lapangan sebagai salah satu barisan terdepan pelaksanaan program-program KB. Berbagai penelitian yang mengupas peran ini sebagai bukti otentik bahwa IMP perlu dilibatkan dalam berbagai program KB tidak terelekan.

Dalam praktiknya IMP menghadapi sejumlah tantangan di lapangan (Puspasari, 2020). Kendala terbesarnya adalah ketika terjadi Covid-19 sejak Maret 2020 lalu di mana BKKN mengeluarkan kebijakan terkait pandemic tersebut (Biro Perencanaan BKKN, 2020). Hal ini

selaras dengan kebijakan nasional yang diberlakukan terkait penanganan Covid-19 di seluruh lapisan masyarakat khususnya yang berkaitan dengan kesehatan (Agustino, 2020). Kebijakan serupa juga diterapkan secara global (WHO, 2020). Kebijakan yang paling populer adalah jaga jarak, menggunakan masker, cuci tangan dan menghindari kerumunan (Tim Kerja Kementerian Dalam Negeri, 2020). Kebijakan ini berpengaruh besar pada peran IMP, karena mereka bertugas dan berinteraksi langsung di lapangan dengan masyarakat luas. Peran tersebut di antaranya meliputi kepengurusan, penyuluhan, motivasi, konseling, pelayanan ulang (rujukan), pedataan dan pencatatan, pertemuan rutin, kegiatan program KB serta kegiatan kemandirian (Sonata, 2016). Dengan adanya restriksi selama masa pandemi Covid-19 ini, akibatnya sejumlah program tidak dapat berlangsung sesuai target atau harapan. Penelitian ini berusaha untuk menganalisa situasi peran IMP selama Pandemi Covid-19 dengan tujuan mengidentifikasi masalah yang dihadapi mereka di lapangan serta menawarkan sejumlah solusinya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif, dikombinasi dengan Survei Analitik (Analytical Survey) dan studi pustaka (*Literature Review*). Studi ini menganalisa Data Primer dari hasil pengolahan kuesioner yang diikuti oleh 57 kader IMP yang diambil secara Online dari Jejaring Sosial pada tanggal 1-4 April 2021 di Kabupaten Trenggalek. Data

Sekunder diperoleh dari tinjauan pustaka ekstensif baik berupa materi elektronik maupun cetak tentang kependudukan, Keluarga Berencana, Covid-19, Peraturan Pemerintah, BKKBN, kebijakan Kementerian Kesehatan, Satuan Tugas Covid-19 di Indonesia, WHO serta berbagai jurnal lainnya yang terkait. Hasilnya dikumpulkan, disusun, dan dianalisis dengan menggunakan

informasi yang relevan dari database *Google Drive, Google Form, Google Scholar*, dalam bahasa Indonesia maupun Inggris, dari dalam dan luar negeri. Dokumen terkait ditinjau mulai periode Januari 2016 hingga Maret 2021. Olah data hasil penelitian menggunakan kombinasi Skala Nominal dan Skala Guttman.

HASIL

Hasil Survei

Tabel 1: Data Demografi

No	Data	F	%
1.	Umur		
	21-30 tahun	12	21.05
	31-40 tahun	32	56.14
	Lebih dari 40 tahun	13	22.80
2.	Jenis Kelamin:		
	Laki-laki	3	5.27
	Perempuan	54	94.73
Total		57	100%

Dari table di atas menunjukkan mayoritas responden IMP berusia

antara 31-40 tahun (56.14%) dan didominasi oleh perempuan (94.73%).

Tabel 2: Tantangan selama Covid-19 dan Optimisme menjalankan program

Merasa ada tantangan				Merasa optimis tetap bisa menjalankan program			
Yes		No		Yes		No	
57	100%	0	0	55	96.5 %	2	3.5 %

Tabel di atas menunjukkan mayoritas responden IMP memiliki optimisme

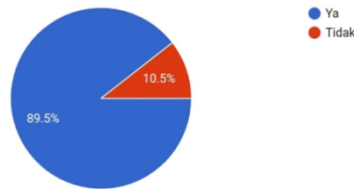
untuk melaksanakan program KB sesuai peran mereka.

Tabel 3: Pengaruh Pandemi terhadap Peran IMP

No	Roles	Total	
		Σ	%
1	Kepengurusan	12	21.05
2	Penyuluhan	57	100
3	Pelayanan Ulang (Rujukan)	18	31.57
4	Pendataan dan Pencatatan	40	71.17
5	Pertemua Rutin,	20	35.08
6	Kegiatan Program KB	30	52.63
7	Kegiatan Kemandiran	20	35.08

Tabel di atas menunjukkan pengaruh terbesar ada pada peran IMP dalam penyuluhan (100%), diikuti Pendataan

dan Pencatatan (71.17%) dan yang ketiga terbesar adalah Kegiatan Rutin KB (52.63%).



Gambar 1: Kemungkinan untuk melakukan pembinaan/penyuluhan Online.

Gambar tersebut menunjukkan 51 responden (89,5%) percaya bahwa penyuluhan atau latihan terhadap

IMP dapat dilakukan secara Online dan 6 responden (10.5%) tidak yakin.



Gambar 2: Apakah pembinaan IMP berguna untuk memperkaya Peran IMP

Gambar di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden (98,7%) yakin bahwa pembinaan selama masa Covid-19 berguna bagi peran IMP. Hanya 1 responden (1.3%) yang tidak yakin. Dari data di atas, dengan perhitungan Skala Nominal menunjukkan 57 responden (100%) merasa Pandemi Covid-19

berdampak besar terhadap peran IMP. Sedangkan dengan menggunakan perhitungan Skala Guttman menunjukkan peran IMP dalam penyuluhan sebesar 200%, disusul peran pendataan dan pencatatan (142.34%) dan peran pelayanan KB (105.26%).

Hasil Literature Review

Studi ini meninjau 32 dokumen, terdiri dari jurnal 13 (40%), berbahasa Inggris 4 (10%), yang berisi Peraturan Pemerintah (lembaga kementerian) 7 (23.3%), lain-lain 8 (26.6%). Yang berhubungan langsung dengan IMP 24 dokumen (73.4%) dan yang tidak langsung 8 dokumen (26.6%). Dokumen-dokumen tersebut di antaranya membahas tentang diperkirakan 12 juta perempuan tidak dapat mengakses layanan keluarga berencana sebagai akibatnya pandemi COVID-19, dengan gangguan pasokan dan layanan yang berlangsung rata-rata 3,6 bulan (UNFP, 2021). Angka ini bisa mencapai 23 juta di ujung proyeksi yang lebih tinggi. Akibatnya sebanyak 1,4 juta kehamilan yang tidak diinginkan mungkin terjadi (UNFP, 2021). Di Indonesia angka kelahiran tidak direncanakan meningkat lebih dari 400.000 (Aditya & Tobing, 2020). Ini merupakan dampak terakhir dari Pandemi Covid-19 di samping rentetan yang terkait dengan peran IMP sebagaimana yang disebutkan pada Tabel nomor 3.

PEMBAHASAN

Dari analisa data hasil Survei di atas serta tinjauan pustaka, prioritas masalah yang ditemukan pada IMP selama masa Pandemi Covid-19 pada studi ini ada 3, yaitu pertama, dampak pandemic terhadap kegiatan penyuluhan, kedua dampak terhadap pendataan dan pencatatan dan yang ketiga dampak pandemic terhadap program kegiatan KB.

Pertama, dampak terhadap peran IMP dalam bidang penyuluhan. Hasil penelitian ini menunjukkan dampak terbesar dari peran IMP karena Covid-19 ada pada peran mereka dalam memberikan penyuluhan. Tugas Pokok BKKBN adalah Melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Berdasarkan Pasal 3

Peraturan Presiden RI No. 62 / 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, BKKBN menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan nasional, pemaduan dan sinkronisasi kebijakan di bidang KKB; b. Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang KKB; c. Pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk; dan KB; d. Penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi di bidang KKB; e. Penetapan perkiraan pengendalian penduduk secara nasional; f. Penyusunan desain Program KKBPK; g. Pengelolaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB / PLKB); h. Pengelolaan dan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk kebutuhan pasangan Usia Subur (PUS) nasional (BKKBN, 2016). Guna mengaplikasikan tugas-tugas tersebut di lapangan dibutuhkan tenaga-tenaga relawan dari dan untuk masyarakat yakni IMP (Yuniarso, 2017). Sebagai penghubungnya dibentuklah PKB sebagaimana yang disebutkan dalam UU No.52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Ansanoor, 2017). Dari sanalah jelas bahwa pembinaan IMP merupakan bagian paling penting di mana peran utama kader IMP di antaranya adalah melakukan KIE dan konseling (Fitriani, 2018). IMP melakukan kegiatan penyuluhan, motivasi dan Konseling Program KKBPK untuk mendorong peningkatan kesertaan dalam ber KB yang semakin mandiri dan lestari. Dengan adanya Covid-19 yang menular dan diterapkannya kebijakan pemerintah dalam upaya penangganya (Agustino, 2020) otomatis berdampak pada kegiatan IMP di lapangan. IMP tidak lagi bisa berinteraksi secara langsung dengan masyarakat. Kegiatan penyuluhan yang semula berupa tatap muka langsung berubah menjadi online Sementara, tidak semua masyarakat memiliki fasilitas, baik berupa jaringan internet maupun perangkat handphone (HP) yang memiliki

aplikasi Android. Hal ini sangat dirasakan oleh masyarakat pedesaan dan di daerah terpencil.

Dampak kedua terhadap Pendataan dan Pencatatan. Dalam studi ini ditemukan sebanyak 71.17% IMP merasa adanya dampak terhadap kegiatan pendataan dan pencatatan. Salah satu indikator keberhasilan program KB adalah angka penggunaan kontrasepsi (*Contraceptive Prevalence Rate* (CPR) dan *Total Fertility Rate* (TFR). Kedua indikator ini di masyarakat datanya diperoleh lewat bantuan IMP (Yuniarso, 2017). Petugas IMP melakukan pemetaan, pendataan, pencatatan bahkan menindaklanjuti kegiatan baik sebelum maupun sesudah bekerjasama dengan PKB di wilayah di mana IMP bertugas (Yuniarso, 2017). Kegiatan-kegiatan tersebut membutuhkan tatap muka langsung. Selama Pandemi Covid-19, kegiatan tatap muka dibatasi karena adanya 'larangan' berupa 'jaga jarak' dan 'menghindari kerumunan' sebagaimana yang tercatum dalam peraturan pemerintah (Kementerian Kesehatan RI, 2020) yang berakibat pada penurunan jumlah pengguna kontrasepsi (Aprillia et al., 2020). Akibatnya pendataan dan pencatatan dilakukan secara online. Sementara tidak semua IMP memiliki perangkat berupa telepon genggam yang memiliki aplikasi Android. Di samping itu, wilayah terpencil tidak semuanya bisa dijangkau oleh jaringan Internet. Akibatnya data yang diperoleh bukan hanya tidak akurat, tetapi juga terhambat baik dari masyarakat ke IMP maupun dari IMP ke PKB (Widodo, 2019). Hambatan serupa juga dialami oleh negara-negara lain secara global (UNFP, 2021). Belum lagi sebagai IMP yang sifat kerjanya sukarela atau tidak memperoleh gaji dari aktivitas yang dilakukan, kecuali dari daerah yang sangat kecil (BKKBN, 2014). Hal ini sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan lembaga di masa sulit seperti Pandemi ini.

Dampak ketiga adalah terhadap peran IMP dalam memberikan layanan KB. Hasil survey menunjukkan 52.63% responden merasakan ada dampak terhadap kegiatan layanan KB. Sebuah penelitian di Pangandaran, Jawa Barat menunjukkan peran IMP dalam keberhasilan program KB sebesar 53.41%. Artinya, IMP memberikan sumbangsih lebih dari separuh dari keberhasilan program lain dalam keberhasilan program KB. IMP memiliki aktivitas yang perlu diperhitungkan dalam setiap program yang berhubungan dengan KB di masyarakat. Hal ini juga diakui oleh badan kesehatan dunia (WHO, 2017).

Ketiga analisa dari serangkaian peran IMP ini membuktikan bahwa selama masa pandemic Covid-19 telah menimbulkan dampak yang sangat besar bukan hanya terhadap kinerja IMP, akan tetapi hasil akhir dari program KB di tingkat lokal, daerah, regional hingga nasional. Dari enam peran IMP yang ada, dampak terbesar ada pada peran sebagai penyuluh, pelayanan program KB serta pendataan dan pencatatan. Dengan adanya pembatasan yang berupa jaga jarak, menghindari kerumunan, tidak adanya komunikasi langsung selama Pandemi Covid-19, otomatis berpengaruh terhadap kinerja IMP di lapangan.

KESIMPULAN

Pengaruh global Pandemi Covid-19 terhadap program Keluarga Berencana yang paling terasa adalah penurunan jumlah akseptor disusul dengan meningkatnya jumlah kelahiran tidak diharapkan. Kedua hal ini tidak lepas dari peran besar kader IMP dalam menjalankan berbagai program KB. Studi ini mengeksplorasi dan menganalisa sejauh mana situasi Pandemi Covid-19 ini terhadap peran IMP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dalam hal penyuluhan, pendataan dan pencatatan serta pelayanan KB merupakan 3 peran

yang sangat dirasakan dampaknya. Oleh sebab itu dibutuhkan kolaborasi dan koordinasi dari berbagai pihak, di tingkat daerah hingga pusat, guna menghindari dampak negatif lebih jauh. Kelemahan studi ini tidak didukung oleh responden yang lebih luas yang bisa mewakili

nasional atau regional. Terlepas dari kekurangannya, diharapkan hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi pada penelitian terkait di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, R. Tobing, S. (2020), Pengaruh Penyuluhan Antisipasi Baby Booming Era Pandemi Bagi Bidan Puskesmas Kota Banjarmasin. Hal. 274-278. Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR).
- Agustino, L., (2020), Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19 : Pengalaman Indonesia Analysis Of Covid-19 Outbreak Handling Policy : The Experience Of Indonesia. Pp. 253-267.
- Ansanoor, S., (2017), Tinjauan Yuridis Kebijakan Penyuluhan Keluarga Berencana di Provinsi Kepulauan Riau. JURNAL SELAT, Hal. 1-8. Volume. 4 Nomor. 2, Mei 2017.
- Aprillia, Y.T., Adawiyah, Robotul, A., Santi, A, (2020), Analisis Penggunaan Alat Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19. Hal. 190-200. Jurnal Untuk Masyarakat Sehat (JUKMAS), Vol. 4, No. 2 Oktober 2020.
- Biro Perencanaan BKKBN, (2020), Strategi BKKBN dalam mengantisipasi Baby Boom pasca pandemi COVID-19, Hal.1-29. Webinar Kebijakan Dak Nonfisik Ta 2020 Dan Rancangan Kebijakan 2021 Dalam Kondisi Pandemi Covid -19.
- BKKBN, (2016). Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-2019, Hal.1-22. Jakarta.
- Fitriani, (2018), Laporan Aktualisasi Optimalisasi Peran Institusi Masyarakat Pedesaan (Imp) Dalam Memberikan Konseling Melalui Aplikasi Kader Di Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur. Hal. 1-105. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga Dan Bina Lini Lapangan Bidang Advokasi, Penggerakan Dan Informasi Perwakilan Bkkbn Provinsi Sumatera Utara.
- Menteri Kesehatan RI, (2020), Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/327/2020 tentang Penetapan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) akibat Kerja sebagai Penyakit akibat Kerja yang Spesifik pada Pekerjaan Tertentu, Hal.1-19. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Puspasari, Y., (2020), Optimalisasi Peran Kader PPKBD dan Sub PPKBD Di Skoharjo, Rancangan Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar PNS Pada Sub Bidang Hubungan Antar Bina Lini Lapangan Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah. Hal. 1-9. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 2020.
- Sonata, S., (2016), Peran Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dalam Menunjang Keberhasilan Program

Keluarga Berencana di Desa Margacinta Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran. Hal. 158-172. Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan. Vol. 2 No.4.

Tim Kerja Kementerian Dalam Negeri, (2020), Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid-19 Bagi Pemerintah Daerah : Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis dan Manajemen. Hal. 1689-1699. Jakarta, Kemendagri.

UNFP, (2021), Impact of COVID-19 on Family Planning : What we know one year into the pandemic. United Nations Population Fund, Pp. 1-9. March 2021.

WHO, (2017). Task sharing to improve access to Family Planning / Contraception, Pp. 1-31. Geneva.

WHO, (2020), Health Workforce Policy And Management In The Context Of The COVID-19 Pandemic Response Interim Guidance. Pp. 1-21. December, 2020. WHO.

Widodo, E.S., (2019), Peran Stake Holder Dalam Mendukung Implementasi Kebijakan Kampung KB, Jurnal Online Internasional & Nasional Vol. 7 No.1, Januari – Juni 2019. Hal. 1-14, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.

Yuniarso, M. (2017), Peran Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (Imp) Dalam Program Kependudukan Keluarga Berencana (KKB) Di Kabupaten Klaten. Hal. 1-13. TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik.